

ANALISIS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN PPDB DI SMPN 1 TELAGA

Dewi Pratiwi Niuwa

Abstract: *In order to improve the quality of services and equalize access to education, the government makes policies on the implementation of New Student Admissions (PPDB). Meanwhile, there is still a lot of dissatisfaction arising from the PPDB system policies. The aim of this research is to analyze stakeholder satisfaction with the PPDB policy at SMPN 1 Telaga. A qualitative approach through case studies was used in this research. Meanwhile, data collection techniques are through interviews and participant observation. Data analysis through thematic and data triangulation. The respondents were school principals, teachers, administrative staff, students and parents. The research results show that stakeholder satisfaction with PPDB policies is influenced by, among other things, process transparency, fairness of the zoning system, and quality of registration services. Parents and students appreciate efforts to equalize access, but there are also those who feel burdened by limited school choices. Teachers and administrative staff identified challenges in the form of a spike in workload during registration and an imbalance in the number of students in classes. The school principal considers this policy to be a positive step, although its implementation still requires improvement, especially outreach and handling public complaints. This research concludes that the level of stakeholder satisfaction tends to vary, depending on their role and experience in the PPDB process. It is hoped that these findings can provide input for the formulation of education policies that are more responsive to community needs.*

Keywords: *Stakeholder Satisfaction, PPDB Policy, Educational Equity.*

Abstrak: Dalam peningkatan mutu layanan dan pemeratakan akses pendidikan pemerintah membuat kebijakan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sementara masih banyak rasa ketidakpuasan yang muncul dari kebijakan sistem PPDB. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga. Pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipan. Analisis data melalui tematik dan tringulasi data. Yang menjadi responden adalah kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, dan orangtua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB dipengaruhi antara lain transparansi proses, keadilan sistem zonasi, dan kualitas layanan pendaftaran. Orang tua dan siswa mengapresiasi upaya pemerataan akses, namun ada juga yang merasa terbebani dengan terbatasnya pilihan sekolah. Guru dan staf administrasi mengidentifikasi tantangan berupa lonjakan beban kerja saat pendaftaran dan ketidakseimbangan jumlah siswa di kelas. Kepala sekolah menilai kebijakan ini merupakan langkah positif, meski implementasinya masih memerlukan perbaikan, terutama sosialisasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan pemangku kepentingan cenderung berbeda-beda, tergantung peran dan pengalaman mereka dalam proses PPDB. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Kepuasan Stakeholder, Kebijakan PPDB, Pemerataan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam membangun suatu bangsa adalah melalui Pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, salah satunya melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi. Tilaar serta Nugroho (Medtek, 2010) yang menyampaikan jika kebijakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan hakikat pembelajaran dalam proses memanusiakan anak manusia jadi manusia merdeka. Kebijakan publik merupakan suatu produk hukum yang berisikan aturan-aturan yang berbentuk tulisan dan ucapan lisan mengenai pernyataan, himbauan, inovasi serta ajakan yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang perlu dipecahkan, dikurangi dan dicegah agar tidak menimbulkan kerugian pada Masyarakat Setyawon (dalam Rizki & Ridwan, 2023). Sistem zonasi, yang menjadi salah satu pendekatan dalam pelaksanaan PPDB, bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah di wilayah tempat tinggal mereka, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Pemerintah berupaya melaksanakan pemerataan pembelajaran dengan menjalankan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, tetapi di sisi lain pada penerapannya praktek kesetaraan pembelajaran sesuatu kebijakan jadi tidak merata Hendrawansyah& Zamroni (Ahmad, 2021).

Namun, implementasi kebijakan PPDB tidak terlepas dari tantangan. Di banyak daerah, termasuk di SMPN 1 Telaga, kebijakan ini memunculkan berbagai tanggapan dari pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, dan orang tua. Di satu sisi, sistem ini dianggap dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Di sisi lain, berbagai persoalan muncul, seperti persepsi tentang keadilan, keterbatasan kapasitas sekolah, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

SMPN 1 Telaga sebagai salah satu institusi pendidikan negeri menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan kebijakan PPDB. Pemahaman dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasinya. evaluasi program sebagai proses terstruktur yang menciptakan dan menyatukan informasi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian para pemangku kepentingan tentang program dan kebijakan yang ditentukan Nugroho (dalam Mutiarin & Hendri W. Junior, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dipahami, diterima, dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan, termasuk dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan hubungan antar pihak yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam kebijakan ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan PPDB, khususnya dalam konteks lokal, dan menjadi rujukan bagi kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Adapun Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

kebijakan PPDB?

3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga. Berikut adalah langkah-langkah dan metode yang akan digunakan:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk memahami fenomena dalam konteks yang lebih luas dan mendalam, yaitu kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga. Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Harahap (dalam Syahrizal & Jailani, 2023)

Desain Penelitian

Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus untuk memfokuskan analisis pada satu kasus spesifik, yaitu kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga. Studi kasus menggambarkan dimana peneliti menggali sesuatu fenomena tertentu (permasalahan) dalam sesuatu waktu serta aktivitas (program, even, proses, institusi ataupun kelompok sosial) dan mengumpulkan data secara terinci serta mendalam dengan memakai bermacam prosedur pengumpulan informasi sepanjang periode tertentu John W. Creswell (dalam Abduh et al., 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:

- Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Pengumpulan data melalui wawancara melibatkan kepala sekolah, guru, pegawai administrasi sekolah, komite dalam hal ini beberapa orangtua dan beberapa siswa. Pertanyaan wawancara akan difokuskan pada pengalaman mereka dalam menghadapi pelaksanaan PPDB dan tingkat kepuasan mereka terhadap proses tersebut.

- Observasi Partisipatif

Observasi terhadap proses PPDB di sekolah, seperti proses pendaftaran dan interaksi antara staf sekolah dengan pemangku kepentingan lainnya, akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang implementasi kebijakan.

- a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui analisis dokumen kebijakan, laporan PPDB, serta komunikasi resmi antara pihak sekolah dan masyarakat juga akan digunakan untuk melengkapi wawancara dan observasi.

Analisis Data

- Analisis Tematik

Data tematik melalui hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Dimana analisis tersebut dengan mengidentifikasi hal atau topik utama yang lebih banyak muncul. Analisis tematik menjadi salah satu cara yang digunakan dalam menganalisa data yang bertujuan menemukan pola atau tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti Braun & Cklarcke (Rozali, 2022). Proses ini meliputi pengkodean data, pengelompokan tema, dan penafsiran hasil temuan dalam konteks kebijakan PPDB. Proses analisis ini akan mengacu pada langkah-langkah berikut:

- Penyandian (Coding): Menandai data wawancara dan observasi untuk

menemukan pola atau tema yang muncul.

- Penyusunan Tema: Mengorganisir tema-tema yang berkaitan dengan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB.
- Interpretasi: Memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan selama penelitian agar memiliki penjelasan yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Temuan dari setiap kategori pemangku kepentingan (kepala sekolah, guru, staf administrasi, orang tua, dan siswa) akan dianalisis secara terpisah untuk menggali perspektif mereka terhadap kebijakan PPDB.

- **Triangulasi Data**

Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini akan membantu mengurangi bias dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan mewakili persepsi yang lebih luas dari pemangku kepentingan (Patton, 2002).

Sumber Data

- Pemangku Kepentingan Internal: Kepala sekolah, guru, dan staf administrasi di SMPN 1 Telaga.
- Pemangku Kepentingan Eksternal: Orang tua siswa dan siswa yang terlibat dalam proses PPDB.

Prosedur Penelitian

- Persiapan: Pengumpulan informasi awal mengenai kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga, serta persiapan instrumen wawancara dan observasi.
- Pengumpulan Data: Melaksanakan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi di lokasi.
- Analisis Data: Menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi untuk menganalisis data yang terkumpul.

Etika Penelitian

Penelitian ini akan menjaga etika dengan memperoleh izin dari pihak yang berwenang di SMPN 1 Telaga dan memastikan bahwa semua partisipan memberikan persetujuan yang diinformasikan. Selain itu, identitas peserta akan dijaga kerahasiaannya untuk memastikan privasi mereka..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi di SMPN 1 Telaga, ditemukan beberapa hal yang menggambarkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB yang diterapkan. Berikut adalah temuan utama:

Kepuasan Kepala Sekolah

Kepala sekolah menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap kebijakan PPDB berbasis zonasi. Ia merasa kebijakan ini telah membantu dalam pemerataan distribusi siswa di wilayah tersebut. Namun, ia juga mencatat adanya tantangan dalam memastikan kapasitas fisik sekolah yang terbatas, yang seringkali mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kepala SMPN 1 Telaga Ibu Anna Taludio menerangkan bahwa :

" Pelaksanaan PPDB sudah cukup baik. Prosesnya berjalan lancar, dan antusiasme dari calon siswa dan orang tua cukup tinggi. Sistem yang kami gunakan juga lebih terorganisir dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun

tantangan yang dihadapi adalah terkait kapasitas fisik sekolah yang terbatas kemudian juga dari segi teknis seperti server sempat mengalami gangguan karena tingginya jumlah pendaftar di hari pertama. Namun, kami segera mengatasinya dengan menambah kapasitas server."

Kepuasan Guru

Ada beberapa pandangan berbeda dan beragam dari guru di SMPN 1 Telaga. Sebagian besar merasa puas karena kebijakan zonasi mempermudah mereka dalam mengajar siswa yang berasal dari lingkungan sekitar yang lebih dikenal. Namun, beberapa guru menyatakan kekhawatiran tentang adanya siswa dengan latar belakang pendidikan yang sangat beragam, yang mempengaruhi kecepatan pembelajaran di kelas. Wakil kepala sekolah Meli Seyaningsih Safii menyampaikan bahwa :

"Saya sangat puas karena kebijakan ini menjadikan siswa lebih mudah untuk hadir tepat waktu dan sangat mendukung kelancaran proses pembelajaran. Hal ini menjadi nilai positif untuk sekolah."

Selain itu salah satu guru yang juga sebagai koordinator bidang Kurikulum Rosmin Tomayahu menerangkan bahwa :

"Jumlah pendaftar sebagian besar berdomisili dekat sekolah. Hal tersebut mempermudah saya dalam merancang materi pembelajaran yang relevan dan menarik untuk mereka. Selain itu, komunikasi dengan orang tua siswa juga lebih mudah karena mereka tinggal di dekat sekolah."

Namun ada juga beberapa guru yang menyatakan kekhawatirannya, seperti yang disampaikan oleh ibu Nurnila Puhi bahwa :

"Tantangan utamanya adalah variasi tingkat kemampuan akademik siswa. Setiap siswa yang masuk disekolah ini memiliki kecerdasan dan keunikan masing-masing juga kemampuan yang berbeda-beda sehingga kami memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang membutuhkan, agar semua siswa tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik."

Kepuasan Staf Administrasi

Staf administrasi mengungkapkan bahwa meskipun mereka dapat mengikuti alur PPDB dengan lebih mudah, namun kendala terbesar mereka adalah sistem pendaftaran yang belum sepenuhnya berbasis teknologi, yang menyebabkan proses administrasi menjadi lambat dan rawan kesalahan. Staf tata usaha Effendi Ishak menyampaikan bahwa :

"Perkembangan teknologi belum mendukung updatenya sistem PPDB disekolah. Proses manual seperti pengumpulan berkas fisik membutuhkan waktu lebih lama dan rentan terjadi kesalahan, seperti berkas yang tertukar atau hilang. Selain itu, tenaga administrasi juga harus bekerja ekstra untuk menginput data secara manual ke dalam sistem."

Selain itu staf tata usaha lainnya Fatma Abdullah menerangkan bahwa :

"Terutama jika terjadi lonjakan pendaftar mengakibatkan antrian yang cukup panjang saat calon siswa dan orang tua datang ke sekolah untuk menyerahkan dokumen. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi. Selain itu, beberapa orang tua juga kesulitan memahami persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga kami harus menjelaskan berulang kali."

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa sistem pendaftaran meskipun sudah berbasis teknologi tetapi masih perlu evaluasi terutama dari segi pelayanan seleksi administrasi.

Gambar 1 Proses Pelaksanaan PPDB



Sumber : Dokumentasi PPDB 2024

Kepuasan Orang Tua dan Siswa

Sebagian besar orang tua dan siswa merasa puas dengan kebijakan zonasi karena memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk bersekolah di SMPN 1 Telaga yang terdekat dan memiliki fasilitas yang baik. Namun, ada juga keluhan terkait kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PPDB, yang menyebabkan kebingungannya orang tua dalam mengikuti proses pendaftaran. Merry Sitanggang selaku orangtua siswa menyampaikan bahwa:

“Salah satu kebijakan zonasi melalui pendaftaran online. Sistem pendaftaran itu memudahkan kami untuk mengisi individu dan mengunggah dokumen tanpa harus datang langsung ke sekolah. Selain itu, informasi tentang jadwal dan persyaratan pendaftaran sudah tersedia sejak awal, sehingga kami bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik.

Namun Merry Sitanggang menambahkan bahwa :

“Teknologi pendaftaran online memberi ruang kemudahan. Hanya saja, individu orang tua yang tidak terbiasa dengan teknologi, mereka masih kesulitan mengikuti proses ini. Mungkin perlu ada pelatihan kecil atau pendampingan bagi mereka.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPDB berbasis zonasi di SMPN 1 Telaga secara umum diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Menurut Freeman (dalam Supardi et al., 2024) ,stakeholder adalah setiap individu tau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau proyek tertentu. Berdasarkan teori tersebut, kepuasan dapat diukur dari sejauh mana ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kebijakan ini dipenuhi.

Salah seorang siswa baru Putri menyampaikan bahwa:

“Saya merasa prosesnya cukup baik. Informasi pendaftaran mudah diakses, dan saya tidak mengalami banyak kesulitan saat mendaftar. Semua tahapannya jelas dan terorganisir. Dari sistem pendaftaran online yang mempermudah kami mendaftar dari rumah juga pihak sekolah cepat tanggap jika ada pertanyaan atau masalah. Hanya saja Saat awal pendaftaran, website-nya sempat lambat karena banyak yang mengakses bersamaan. Tapi setelah itu, semuanya berjalan lancar”.

a. Kepuasan terhadap Proses Pendaftaran

Sebagian besar pemangku kepentingan mengharapkan proses PPDB yang lebih transparan dan efisien. Menurut Kotler dan Keller (Supardi et al., 2024), stakeholders adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi dan dipengaruhi oleh aktivitas organisasi tersebut. Sehingga aktifitas dalam proses PPDB harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, terutama dalam tahap sosialisasi kebijakan.

Kurangnya sosialisasi yang jelas menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan kebingungannya orang tua dan siswa. Maya Anggriani Ali orangtua salah satu siswa baru menyampaikan bahwa :

“Adanya sosialisasi cukup membantu hanya saja belum optimal. Informasi yang disampaikan terkadang kurang rinci, sehingga kami harus bertanya-tanya lagi. Saya berharap sosialisasi bisa dimulai lebih awal, sehingga kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan dokumen dan memahami prosesnya. Selain itu, informasi sebaiknya disampaikan melalui berbagai media, seperti media sosial, grup WhatsApp, atau surat resmi, agar bisa menjangkau lebih banyak orang tua.”

Gambar 2 Proses Pendaftaran PPDB



Sumber : Dokumentasi PPDB 2024

b. Kepuasan terhadap Keadilan dan Akses

Adanya kebijakan zonasi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Dalam masyarakat otoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Upaya menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun sistem pendidikan yang efisien, bermutu, dan relevan dengan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang Suaeb (Fika et al., 2023). Kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan keadilan dalam distribusi sumber daya. Meskipun kebijakan ini membantu distribusi siswa lebih merata, namun tantangan terkait kapasitas fisik sekolah tetap menjadi kendala besar. Orangtua siswa Merry Sitanggung menerangkan bahwa :

“Saya cukup puas dengan transparansi yang ada. Hasil seleksi diumumkan secara terbuka, dan kriteria penerimaan, seperti jarak rumah ke sekolah, sudah dijelaskan dengan baik. Tapi, saya berharap ada mekanisme pengaduan yang lebih jelas untuk orang tua yang merasa ada ketidakadilan. Saya berharap semua sekolah memiliki fasilitas dan kualitas yang merata, sehingga orang tua tidak merasa harus memilih sekolah tertentu. Dengan begitu, sistem zonasi akan lebih efektif, dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang ketimpangan kualitas pendidikan.”

Putri siswa baru juga menyampaikan kepuasannya bahwa :

“Saat mendaftar sempat terkendala server, mungkin karena banyak yang akses tetapi itu tidak berlangsung lama. Setelah itu, semuanya berjalan lancar. Saya berharap sistemnya bisa lebih cepat dan stabil, terutama untuk pendaftaran online. Selain itu, mungkin sekolah bisa memberikan lebih banyak informasi atau panduan untuk siswa baru agar kami lebih siap.”

c. Teknologi dan Infrastruktur

Seiring dengan penerapan kebijakan berbasis teknologi, kesenjangan

infrastruktur di antara sekolah masih menjadi masalah. Menurut Creswell (Maret & Digital, 2018) penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pilihan alternative pendekatan diantaranya: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, naratif. Penerapan teknologi dalam penelitian kualitatif juga berlaku untuk proses administrasi sekolah yang lebih modern.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur teknologi untuk mempermudah proses pendaftaran dan evaluasi kebijakan. Sebagai orangtua Maya Anggriani memberi harapan untuk pelaksanaan kedepan disampaikan bahwa :

"Server tetap terjaga agar mudah saat digunakan. Ruang pendaftaran terjangkau dan sesuai. Petugas juga sigap membantu. Tapi antrian masih cukup panjang karena keterbatasan tempat, jadi mungkin perlu ditambah ruangan atau diperluas ruang tunggu."

Secara keseluruhan, kebijakan PPDB di SMPN 1 Telaga diterima dengan positif oleh sebagian besar pemangku kepentingan, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu ditangani, seperti transparansi, kapasitas sekolah, dan infrastruktur. Perencanaan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dinamika perubahan di lapangan dan melibatkan pemangku kepentingan sejak awal untuk memastikan keberhasilannya Fullan (dalam Zuanda et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Telaga diterima dengan cukup baik oleh sebagian besar pemangku kepentingan, meskipun masih terdapat beberapa area yang membutuhkan perhatian lebih. Kepuasan kepala sekolah, guru, staf administrasi, orang tua, dan siswa terhadap kebijakan ini sangat bergantung pada kejelasan proses, distribusi sumber daya yang adil, serta kemudahan akses melalui teknologi. Meskipun kebijakan zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi siswa, masih ada tantangan terkait kapasitas sekolah, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya sosialisasi yang memadai. Secara keseluruhan, kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan PPDB dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan di area-area tersebut. Hal ini penting agar kebijakan PPDB dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pemerataan akses pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Abdullah, R., & Afgani, M. W. (2023). Jurnal pendidikan sains dan komputer survey design: cross sectional dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 31–39.
- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129–135. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v7n3.p129-135>
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- Maret, U. S., & Digital, E. (2018). Pemanfaatan Internet dalam Administrasi Sekolah Bidang Kesiswaan pada Era Digital.
- Medtek, J. (2010). *Aka N Pendidikan J Medtek*. 2.
- Mutiarin, D., & Hendri W. Junior. (2020). *K Epemimpinan T Ransformasional D Alam M*

- Eningkatkan. Evaluasi Penerapan Siap-Ppdb Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan, 11(1), 106–112.
- Rizki, T. M., & Ridwan, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68. www.researchgate.net
- Supardi, D., Sekretari, A., & Ariyanti, M. (2024). Pengukuran Tingkat Pemahaman Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran (Vmts) Akademi Sekretari Dan Manajemen (Asm) Ariyanti. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 302–307.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 1, 13–23.
- Zuanda, S., Fahrezi, D. W., Rised, G. F., & Syaifuddin, M. (2024). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27207–27218.